

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al Quar'an dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia
- Ahmad Mujahidin, 2007, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Refika aditama, Jakarta.
- B.F. Sihombing, 2004, *evolusi kebijakan pertanahan dalam hukum tanah Indonsia*, Gunung Agung, Jakarta.
- Bernhard Limbong, 2012, *Reforma Agraria*, Margaretha Pustaka, Jakarta.
- _____, 2012, *Hukum Agraria Nasional*, Margaretha Pustaka, Jakarta
- _____, 2015, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Pustaka Margaretha, Jakarta
- Boedi Harsono, 1994, *Hukum Agraria Indonesia, Syarat Pembentukan UUPA lsi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta
- _____, 2008, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta.
- Darwin Ginting, 2013, *Pengkajian Hukum tentang penyelesaian sengketa tanah melalui Peradilan Adat*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI, Jakarta.
- El-Muhtaj, Majda, 2009, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana: Jakarta.
- Elza Syarif, 2012, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, PT Gramedia, Jakarta.
- Heru Nugroho, 2001, *Mengingat kekuasaan Negara*, Muhammadyah University pres, Surakarta
- I made Widnyana, 2014, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, Fikahati Aneska, Jakarta.

- Imam al-mawardi, 2015, *Ahkam Sulthaniyah*, Qisthi Press, Jakarta.
- Jalal al Anshari, 2004, *mengenal sistem islam dari A sampai Z*, Pustaka Thariqul Izza, Bogor.
- Koentjaraningrat, 1982, *kebudayaan Mataliteit dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta.
- M.Arba, 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta
- M. Yahya Harahap, 1991, *Arbitrase*, Pustaka Kartini, Jakarta
- _____, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika. Jakarta
- Maria S.W. Sumardjono, Nurhasan Ismail, Isharyanto, 2008, *mediasi sengketa tanah*, Kompas Media Nuasantara, Jakarta.
- Maria S.W. Sumardjono ,2009, *perencanaan pembangunan Hukum Nasional bidang pertanahan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Pembinaan Hukum dan HAM RI, Jakarta
- _____, 2008, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, sosial, dan Budaya*, Buku Kompas, Jakarta
- Martiman Prodjornidjojo,2005, *Hukum Acara Pengadilan TUN dan Undang-Undang PTUN 2004*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Mul Mulyani Sutedjo, A.G. Kartasapoetra, 2010, *Pengantar ilmu tanah*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mulyo Putro,2002, *Pluralisme Hukum dan Penyelesaian sengketa di luar pengadilan*, Fokus Media, Bandung.
- Ni'matul Huda, 2013, *Hukum tata Negara Indonesia*, edisi revisi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Nurtjahjo, *Hendra*, 2006, Filsafat Demokrasi, Bumi Aksara: Jakarta
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Juremetri*, cetakan kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Samun Ismaya, 2011, Pengantar hukum Agraria, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Sugiono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung

Suhariningsih, 2009, *Tanah Terlantar*. Prestasi Pustaka Raya, Jakarta

Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana Prenadamedia group, Jakarta

Wawan Muhwan Hariri, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.

Widayati, 2011, *Negara Hukum, konstitusi, dan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan*, Unissula Press, Semarang

Winardi, 2005, Buku Bahasa Indonesia, Erlangga, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Kepailitan Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

PROLEGNAS Tahun 2015

Rancangan Undang – undang Pertanahan

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pertanahan

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan

Peraturan Menteri Negara Agraria/ kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No 3 Tahun 2011 tentang pengelolaan pengkajian dan penanganan kasus pertanahan

LAIN-LAIN

Abdul Ghofur, 2008, tesis *Problematika hak opsi penyelesaian sengketa perbankan syariah*. mahasiswa pascasarjana program magister ilmu hukum Unissula semarang

Abdullah Maksum Aldiansyah, 2009, Tesis: Kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa antar lembaga Negara menurut UUD 1945. Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Semarang

Agus widodo, 2012, tesis :pelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadic di kecamatan kaliwungu kabupaten Kendal, Mahasiswa program magister ilmu hukum Unissula semarang.

Artikel Mahasiswa Universitas islam sultan Agung Semarang, *Peradilan Khusus Agraria*, dalam Lomba Debat Mahkamah Konstitusi tingkat Nasional tahun 2015

Artikel mahasiswa Universitas Hasanuddin, *Peradilan Khusus Agraria*, dalam lomba Debat Mahkamah Konstitusi tingkat Nasional tahun 2015

Badan Pertanahan Nasional, Strategi pencegahan sengketa, konflik dan perkara, Lampiran Dokumen rapat koordinasi Badan Pertanahan Nasional dengan Badan Intelijen Negara Republik Indonesia tentang pembaharuan Agraria Nasional serta penanganan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan, Jakarta 8 Maret 2007

Helvis, 2006, Tesis: kewenangan peradilan Militer dalam sisitem peradilan di Indonesia. Mahasiswa Program Pascasarjana di Unissula semarang

Hyronimus Rhiti, 2011, Filsafat Hukum, Universitas Atmajaya: Yogyakarta. Hlm. 245 sebagaimana dikuti oleh mahasiswa UNHAS dalam artikel lomba debat Mahkamah konstitusi dengan judul Pro kontra peradilan khusus agrari tahun 2015

Ismail Alrip, Farida Patittinggi, Faisal Abdullah, *Pengaturan Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Sebagaimana yang dikutip dalam Naskah Akademik RUU Pertanahan

Laode Abul Mufakhir, 2015, Peranan Kepala Adat dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat melalui Mediasi, Mahasiswa Program Pascasarjana di Unissula semarang

M. Samsul Hadi, *Menanti Kelahiran Komisi Penengah Konflik Agraria*, Harian Kompas, 25 Juni 2004

Maria Sumardjono, “*Pembaruan Agraria dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan*”, makalah pada RDPU Komisi II DPR-RI, Jakarta, 9 Februari 2012. Sebagaimana dikutip dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pertanahan.

_____, 2008, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, hal 112 Sebagaimana dikutip oleh Prof Dr Paulus Effendie Lotulung, S.H., dalam makalah “Tanah Permasalahannya di Peradilan Tata Usaha Negara “disampaikan dalam seminar yang diselenggarakan oleh sigma Research Institute tanggal 26 Maret 1996”

Risnawati. 2013, Peran Pemerintah daerah terhadap penggunaan tanah untuk proyek pertambangan ditinjau dari aspek kesejahteraan masyarakat. mahasiswa Program Pascasarjana di Unissula semarang

Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember 1948

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1991, Edisi kedua, Balai Pustaka, Jakarta.

Harian Kompas, tanggal 19 Juni 2004

Laporan Akhir Kajian Pola Penyelesaian Masalah Pertanahan, Puslitbang BPN 2004.

Penelitian Kerja Sama Puslitbang BPN RI dan Unair

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta

<http://sp2010.bps.go.id/> diakses pada hari senin tanggal 1 februari 2016 jam 14.00 WITA.

<http://balilatar.blogspot.co.id/2015/03/menghayati-dan-memaknai-indonesia-pusaka.html> lagu Indonesia Pusaka sebagaimana diciptakan oleh Ismail Marzuki yang di akses pada hari senin tanggal 1 Februari 2016 jam 17.00 WITA

http://litbangdiklatkumdil.net/puslitbang-hukum-dan-peradilan/dok-kegiatan_litbang_kumdil/1159-fgd-proposal-penelitian-urgensi-pembentukan-pengadilan-pertanahan - di - indonesia.html diakses pada tanggal 04 Oktober 2015 jam 09.20 WITA

<http://hqosim.blogspot.co.id/2014/11/tafsir-qs-nisa-ayat-58-dan-al-maidah.html> diakses pada tanggal 15 oktober 2015 jam 06.35 WITA

The house of khilafah 1924.org (<http://www.khilafah1924.org>).

<http://www.antaranews.com/arc/2007/5/22/bpn-ada-2810-kasus-sengketa-tanah-skala-nasional/dan> Badan pertanahan Nasional strategi pencegahan sengketa,konflik dan perkara sebagaimana dikutip oleh Maria S.W. Sumardjono,2009, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional bidang pertanahan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Pembinaan Hukum dan HAM RI, Jakarta hal 110

http://litbangdiklatkumdil.net/puslitbang-hukum-dan-peradilan/dok-kegiatan_litbang_kumdil/1159-fgd-proposal-penelitian-urgensi-pembentukan-pengadilan-pertanahan -di- Indonesia.html diakses pada tanggal 04 Oktober 2015 jam 09.20 WITA